

# FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN MANDIRI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ABELI KOTA KENDARI

*Factors Related To The Fee Payment Arrears BPJS Health Self Health Work In The City Abeli Kendari*

**Abrizal Hasyim<sup>1</sup>, H. Muh. Idrus<sup>2</sup>, Sartini Rizky<sup>3</sup>**

Program Studi Kesehatan Masyarakat  
Stikes Mandala Waluya Kendari  
([ramanajoan@gmail.com](mailto:ramanajoan@gmail.com), 082197795420)

## ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan menetapkan kewajiban membayar iuran yang harus di ikuti masyarakat guna mendapatkan jaminan kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu banyak peserta BPJS yang menunggak membayar iuran BPJS-nya. Pada bulan juni 2018 terdapat 711 jiwa yang masih menunggak pembayaran iuran BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS kesehatan Mandiri di Puskesmas Abeli Kota Kendari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan *cross sectional study*. Populasi adalah seluruh peserta BPJS yang menunggak di Puskesmas Abeli Kota Kendari sebanyak 711. Jumlah sampel sebanyak 88 responden. Penelitian ini menggunakan uji *Chi-square*.

Hasil uji statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , diperoleh hasil ada hubungan cukup kuat antara pengetahuan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS (*p-value* = 0,000), ada hubungan cukup kuat antara pendapatan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS (*p-value* = 0,000), ada hubungan cukup kuat antara persepsi dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS (*p-value* = 0,000).

Kesimpulan menunjukkan bahwa penunggakan pembayaran iuran BPJS berhubungan dengan semua variabel penelitian. Olehnya itu disarankan perlu adanya sosialisasi dari pihak BPJS agar peserta lebih memahami tentang BPJS sehingga dalam pembayaran iuran peserta BPJS tidak menunggak.

**Kata Kunci : Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS, Pengetahuan, Pendapatan, Persepsi**

## ABSTRACT

*Health Security Agency establishes the obligation to pay dues that must be followed in order to get health insurance society. But over time many participants BPJS is delinquent paying his dues BPJS. In June 2018 there were 711 souls who are still in arrears dues BPJS. This study aims to determine the factors associated with health BPJS arrears dues payments Independent in Puskesmas Abeli Kendari.*

*This research is an analytic study with cross sectional study. The population is all participants are in arrears in the health center BPJS Abeli Kendari as 711. Total sample of 88 respondents. This study using Chi-square test.*

*The results of statistical tests at the significance level  $\alpha = 0.05$ , the result is no strong enough relationship between knowledge and dues payment arrears BPJS (*p-value* = 0.000), there is a strong enough correlation between income with payment arrears dues BPJS (*p Value*= 0.000), there is a strong enough correlation between the perception of the arrears payment of dues BPJS (*p-value* = 0.000).*

*The conclusion showed that the non-payment of dues BPJS in touch with all the variables. By him that suggested need for socialization of the BPJS that participants understand more about BPJS resulting in the payment of contributions of participants BPJS not delinquent.*

**Keywords : Patient services BPJS satisfaction, Service speed, Service attitude, Drug availability**

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa serta social yang sangat memungkinkan setiap individu hidup produktif dengan cara social serta ekonomis. Dalam mengatur masalah kesehatan diperlukan suatu badan khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, dimana badan tersebut harus memberikan mutu pelayanan yang baik agar dapat tercapainya kepuasan pelayanan kesehatan. Di Indonesia telah didirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan.<sup>1</sup>

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan komitmen global setiap Negara mengemban Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>2</sup>

Selama dua tahun berlalunya program JKN, belum seluruhnya masyarakat Indonesia terlindungi JKN. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah peserta BPJS

kesehatan. Secara nasional, jumlah peserta BPJS Kesehatan Tahun 2016 adalah 163 juta jiwa dari 255 juta jiwa penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilayaninya dalam menentukan cara yang paling efektif menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Peserta BPJS kesehatan berdasarkan UU terbagi dua yakni Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan untuk masyarakat yang miskin atau keluarga yang tidak mampu tersebut pemerintah mengcover kedalam program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah terintegrasi ke dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).<sup>3</sup>

Dalam aturan program BPJS untuk pembayaran premi diwajibkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Terjadinya tunggakan karena tidak adanya mental gotong royong dalam hal iuran. Ini dikarenakan kebanyakan peserta yang mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan adalah peserta dengan resiko sakit didepan mata. Seperti peserta yang butuh segera pengobatan kesehatan (Riwayat Penyakit) dengan biaya mahal. Peserta seperti ini antusias dalam mendaftarkan kepesertaan program BPJS tetapi setelah proses pengobatan kesehatan di lalui, peserta pun avuh terhadap kewajiban pembayaran iuran.<sup>4</sup>

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 diketahui jumlah pengguna BPJS mandiri baru mencapai 65%. Dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pula menunjukkan Kota Kendari pencapaian target baru dapat 68%. Menurut hasil laporan dari

Dinas Kesehatan Kota Kendari salah satu Kecamatan yang masih rendah peserta BPJS mandiri Kecamatan Abeli dari kuota yang tersedia jika dibandingkan dengan Kecamatan Lain seperti Kecamatan Kemaraya dan Kecamatan Nambo.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil survey awal di Wilayah kerja Puskesmas Abeli bahwa kepesertaan BPJS Mandiri adalah kepesertaan yang sifatnya tergantung dari kemauan sendiri dalam hal membayar iuran. Dalam hal ini social ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap rasa ingin dan mau membayar peserta unuk terus dan patuh membayar iuran. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin rendah bisa menyebabkan rasa keinginan dan kemampuan peserta untuk tidak membayar iuran BPJS Mandiri. Sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara dengan peserta BPJS Mandiri mengatakan bahwa mereka akan membayar iuran ketika sudah mengalami sakit baru mereka mengurus dan membayar iuran BPJS, kemudian proses administrasi dan pembayaran ke Bank yang dirasa peserta sangat berbelit-belit, masalah selanjutnya yang dihadapi peserta mengenai masalah pembayaran iuran yang dirasa oleh peserta sangat memberatkan bagi mereka.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti maka di dapatkan data bahwa kunjungan pasien BPJS pada periode April 2018 berjumlah 376 pasien, menurun dari periode Februari jumlah pasien BPJS adaah 421 pasien, serta bulan Januari berjumlah 477 pasien BPJS. Selain itu, cakupan BPJS mandiri tahun 2017 adalah 66,2% yang masih belum mencapai target 75%

di tahun 2017. Jumlah anggota BPJS Mandiri yang tercatat untuk Wilayah Kecamatan Abeli periode 2017 adalah 2.547 jiwa. Data pembayaran iuran BPJS periode 3 bulan terakhir adalah pada bulan April 2018 terdapat 469 jiwa (18,4%) mengalami keterlambatan pembayaran, pada bulan Mei terdapat 342 jiwa (13,4%), dan meningkat drastis bulan juni 2018 masih terdapat 711 jiwa (27,9%) yang masih menunggak pembayaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keteraturan dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran BPJS secara teratur dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pengetahuan, pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, kemampuan membayar iuran, serta kemauan dalam membayar iuran. Dalam penelitian ini, variabel kemauan dan kemampuan dalam membayar JKN tidak diteliti karena ketika telah telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran, maka peneliti menambahkan beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, pendapatan dan presepsi terhadap penunggakan pembayaran iuran BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan *cross sectional study* yakni penelitian yang hendak menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen yakni hubungan antara Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Mandiri dengan pengetahuan, pendapatan dan

persepsi dan penelitian yang dilakukan pada waktu dan tempat secara bersamaan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November Tahun 2018 yang bertempat di Wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari. Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh seluruh peserta BPJS yang menunggak di wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari berjumlah 711 jiwa, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Instrumen atau alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji statistik penelitian ini menggunakan *uji Chi square*.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 88 responden kelompok umur terbanyak yaitu kelompok umur terbanyak pada kelompok umur > 40 tahun sebanyak 39 responden (44,3%) dan terkecil kelompok umur 26 - 30 tahun yaitu 3 responden (3,4%). Untuk pendidikan dari 88 responden menunjukkan bahwa pendidikan terbanyak yaitu SMA sebanyak 38 responden (43,2%) dan terkecil SD yaitu 2 responden (2,3%). Untuk pekerjaan dari 88 responden menunjukkan bahwa pekerjaan terbanyak yaitu Wiraswasta sebanyak 47 responden (53,4%) dan terkecil wiraswasta dan ibu rumah tangga yaitu 8 responden (9,1%).

**Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan dan Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari**

Karakteristik	n (98)	%
<b>Umur</b>		
26-30	3	3,4
31-35	22	25
36-40	24	27,3
>40	39	44,3
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan</b>		
SD	2	2,3
SMP	12	13,6
SMA	38	43,3
Diploma	17	19,3
Perguruan Tinggi	19	21,6
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Pekerjaan</b>		
Wiraswasta	47	53,4
Pedagang	12	13,6
Nelayan/Pelaut	21	28,9
Ibu Rumah Tangga	8	9,1
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

Sumber : Data primer 2018

Hasil penelitian Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%), responden yang pengetahuan kurang sebanyak 48 (54,5%)

responden, yang tidak menunggak sebanyak 8 (9,1%) responden dan menunggak sebanyak 40 (45,5%). Sedangkan responden yang

pengetahuan cukup sebanyak 40 (45,5%) responden, yang tidak menunggak 26 (29,6%) dan menunggak sebanyak 14 (15,9%) responden. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai *p value* atau signifikan adalah 0,000 dan  $\alpha = 0,05$ . Nilai *p* lebih kecil dari  $\alpha$  ( $p < \alpha 0,05$ ), maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan pengetahuan responden di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018.

Hasil penelitian Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%), responden yang pendapatan kurang sebanyak 58 (65,9%)

responden, yang menunggak sebanyak 46 (52,3%) responden dan tidak menunggak sebanyak 12 (13,6%). Sedangkan responden yang pendapatan cukup sebanyak 30 (34,1%) responden, yang menunggak sebanyak 8 (9,1%) dan tidak menunggak sebanyak 22 (25,0%) responden. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai *p value* atau signifikan adalah 0,000 dan  $\alpha = 0,05$ . Nilai *p* lebih kecil dari  $\alpha$  ( $p < \alpha 0,05$ ), maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan pendapatan responden di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018.

**Tabel 2. Hubungan Penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan pengetahuan, pendapatan, persepsi di Puskesmas Abeli Tahun 2018**

Variabel	Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS						Uji Statistik
	Menunggak		Tidak Menunggak		Total		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>Pengetahuan</b>							$\alpha = 0,05$
Kurang	40	45,5	8	9,1	48	54,5	$p\text{-Value} = 0,000$
Cukup	14	15,9	26	29,5	40	45,5	
<b>Penghasilan</b>							$\alpha = 0,05$
Kurang	46	52,3	12	13,6	58	65,9	$p\text{-Value} = 0,000$
Cukup	8	9,1	22	25,0	30	34,1	
<b>Persepsi</b>							$\alpha = 0,05$
Cukup	32	36,4	6	6,8	38	43,2	$p\text{-Value} = 0,000$
Kurang	22	25,0	28	31,8	50	56,8	

Sumber : Data Primer 2018

Hasil penelitian Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%), responden yang persepsi baik sebanyak 50 (56,8%) responden, yang menunggak sebanyak 22 (25,0%) responden dan tidak menunggak sebanyak 28 (31,8%). Sedangkan responden yang persepsi kurang sebanyak 38 (43,2%) responden, yang

menunggak sebanyak 32 (36,4%) dan tidak menunggak sebanyak 6 (6,8%) responden. Berdasarkan hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai *p value* atau signifikan adalah 0,000 dan  $\alpha = 0,05$ . Nilai *p* lebih kecil dari  $\alpha$  ( $p < \alpha 0,05$ ), maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang

berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan persepsi responden di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018.

## PEMBAHASAN

Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita, oleh karenanya pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Menurut Notoatmodjo (2007), bahwa pengetahuan yang cukup tentang JKN berpengaruh terhadap perilaku kepesertaan masyarakat dalam JKN. Apabila pengetahuan masyarakat kurang tentang JKN maka akan berdampak pada sikap masyarakat terhadap program tersebut.<sup>7</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%) kategori pengetahuan Kurang sebanyak 48 responden (54,5%), yang menunggak pembayaran iuran sebanyak 40 responden (45,5%) hal ini disebabkan karena karena pendapatan responden yang masih kurang serta ada responden yang mengatakan sering lupa membayar iuran, yang tidak menunggak sebanyak 8 responden (9,1%) hal ini disebabkan karena responden sadar pentingnya membayar iuran untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 40 responden (45,5%), yang menunggak sebanyak 14 responden (15,9%) hal ini disebabkan karena responden belum memahami dan mengetahui pentingnya membayar iuran BPJS, karena dengan rutin

membayar pasien mendapatkan jaminan kesehatan yang layak, yang tidak menunggak sebanyak 26 responden (29,5%). Hal ini disebabkan karena responden mendapatkan dukungan dan motivasi dari tetangga untuk rutin membayar iuran tepat waktu serta pendapatan tergolong cukup.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil,  $p ( 0,000 )$  lebih kecil dari  $\alpha ( p < \alpha 0,05 )$ , maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan pengetahuan di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nopiyani (2015) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang JKN dengan kepatuhan membayar, semakin tinggi pengetahuan JKN maka semakin besar kepatuhan dalam membayar iuran.<sup>8</sup> Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang menyebut bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan cukup namun tidak patuh membayar iuran BPJS mandiri dikarenakan faktor seperti masih banyak responden yang belum paham tentang BPJS Kesehatan, kurangnya dukungan dari keluarga, dan dalam mendapatkan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan belum efektif.<sup>9</sup>

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Teori oleh Kertayasa (2010) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi

kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran.<sup>10</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%) kategori pendapatan cukup sebanyak 30 responden (34,1%), yang menunggak pembayaran iuran sebanyak 8 (9,1%) hal ini disebabkan karena karena pengetahuan responden yang masih kurang memahami fungsi jaminan kesehatan, serta ada responden yang mengatakan sering lupa membayar iuran, yang tidak menunggak sebanyak 22 responden (25,0%) hal ini disebabkan karena responden sadar pentingnya membayar iuran untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak serta pendapatan yang mencukupi. Sedangkan responden yang memiliki pendapatan kurang sebanyak 58 responden (65,9%), yang menunggak sebanyak 46 responden (52,3%) hal karena responden menyatakan karena pendapatan yang pas-pasan sebagai faktor utama keterlambatan membayar iuran BPJS, yang tidak menunggak sebanyak 12 responden (13,6%) responden. Hal ini disebabkan karena responden mendapatkan dukungan dan motivasi dari anggota keluarga yang paham mengenai aturan mendapatkan jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil,  $p ( 0,000 )$  lebih kecil dari  $\alpha ( p < \alpha 0,05 )$ , maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan pendapatan di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018.

Persepsi adalah bagian dari penilaian individu yang merupakan karakteristik kebutuhan yang memungkinkan untuk mencari pengobatan yang dapat terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai kebutuhan. Dengan kata lain kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Presepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 88 responden (100%) kategori presepsi baik sebanyak 50 responden (56,8%), yang menunggak pembayaran iuran sebanyak 22 responden (25,0%) hal ini disebabkan karena karena pengetahuan responden yang masih kurang memahami fungsi jaminan kesehatan, yang tidak menunggak sebanyak 28 responden (31,8%) hal ini disebabkan karena responden sadar pentingnya membayar iuran untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak didukung dengan presepsi responden mengenai jaminan kesehatan, serta pendapatan yang mencukupi. Sedangkan responden yang memiliki presepsi kurang sebanyak 38 responden (43,2%), yang menunggak sebanyak 32 responden (36,4%) hal karena presepsi responden yang beranggapan tetap bisa mendapat jaminan kesehatan dari badan penyelenggara saat sakit dan langsung membayar tunggakan, yang tidak menunggak sebanyak 6 responden (6,8%). Hal ini

disebabkan karena responden mendapatkan dukungan dan motivasi dari anggota keluarga yang paham mengenai aturan mendapatkan jaminan kesehatan serta pendapatan yang cukup.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil,  $p ( 0,000 )$  lebih kecil dari  $\alpha ( p < \alpha 0,05 )$ , maka hipotesis yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  di terima yang berarti ada hubungan antara penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan persepsi di Puskesmas Abeli Kota Kendari tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2017) yang menunjukkan bahwa persepsi mempunyai hubungan yang bermakna dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri di wilayah kerja Puskesmas Batalaiworu. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) yang dilihat dari hasil uji Chi Square menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS mandiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penunggakan pembayaran iuran BPJS kesehatan mandiri di wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari, maka dapat disimpulkan Ada hubungan cukup kuat antara pengetahuan dengan Penunggakan pembayaran iuran BPJS di wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari, Ada hubungan cukup kuat antara pendapatan dengan Penunggakan pembayaran iuran BPJS di wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota

Kendari, Ada hubungan cukup kuat antara persepsi dengan Penunggakan pembayaran iuran BPJS di wilayah kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran dalam penelitian ini yakni, Untuk pihak BPJS kesehatan untuk memberikan sosialisasi atau informasi kepada peserta BPJS agar peserta memahami tentang program BPJS serta aturan dan kewajiban peserta BPJS, Untuk pihak Puskesmas agar meningkatkan kualitas pelayanan dan melayani tanpa membedakan pasien BPJS dan Non-BPJS, Untuk penelitian selanjutnya, Peneliti berharap adanya penelitian lanjut terkait dengan masalah penunggakan pembayaran iuran BPJS dengan menggunakan variabel lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan dengan penuh rasa hormat, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula pada pihak Yayasan Mandala Waluya yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi khususnya dibidang pendidikan. Pihak yang terkait hal ini masyarakat peserta BPJS Mandiri yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari terima kasih atas ketersediaan waktu dan lokasi selama penelitian, dan seluruh pihak atas motivasi dan dukungannya

**DAFTAR PUSTAKA**

1. BPJS Kesehatan. 2014. Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Kemenkes RI. 2014. Seputar BPJS Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
3. BPJS. 2016. Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
4. Rismawati dkk. 2017. Faktor yang Berhubungan Terhadap Keputusan Membayar Iuran BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Halu Oleo.
5. Dinkes Provinsi Sultra. 2017. Data Kepesertaan BPJS Provinsi Sulawesi Tenggara. Dinkes. Kendari: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Puskesmas Abeli. 2018 Profil Puskesmas Abeli. Kendari: Puskesmas Abeli.
7. Notoatmodjo S. 2007. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
8. Pratiwi AN. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Peserta Mandiri (Studi kasus pasien rawat inap rumah sakit dr. Soebandi Kabupaten Jember). Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.. <http://repository.unej.ac.id>. Diakses 12 november 2018
9. Nopiyani N.M.S. 2015. Analisis Determinan Kepatuhan dan Pengembangan Strategi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Iuran Pada Peserta JKN Non PBI Mandiri dengan Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan Di Kota Denpasar. Fakultas Kedokteran Univesitas Udayana.
10. Kertayasa. 2010. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kemauan Membayar Iuran Dana Sehat secara Teratur di Desa Tertinggal di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri.id>. Diakses 12 november 2018.